

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

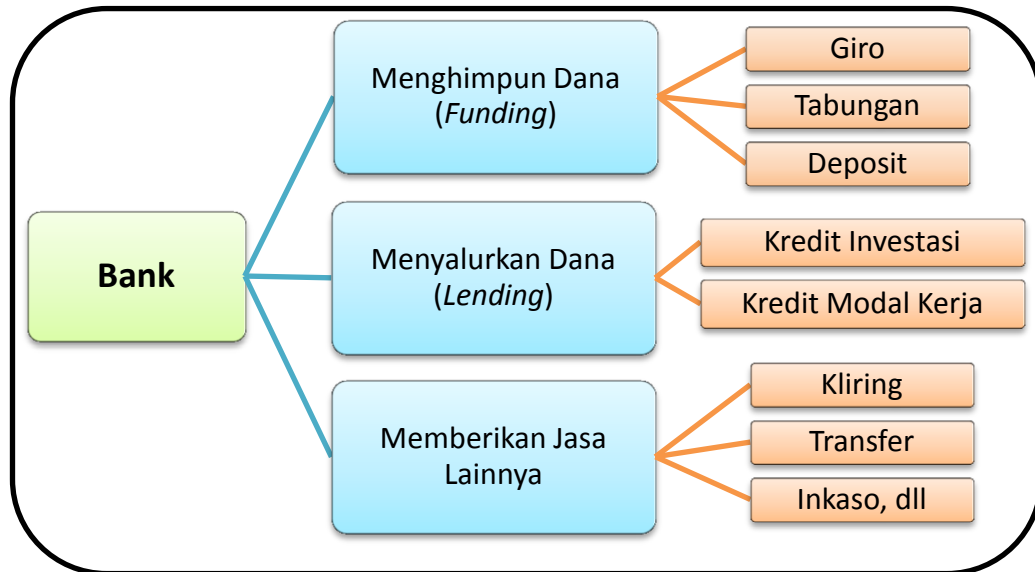
Bank adalah lembaga keuangan tempat dimana suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana untuk disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana untuk membantu perekonomian agar tetap berjalan. Disebutkan pada Ps. 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa :

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Selain itu, menurut menurut Sigit dan Totok bank merupakan lembaga keuangan yang mebhimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana yang didapat secara langsung dari simpanan dana masyarakat yakni berupa tabungan, giro dan deposito, sedangkan yang secara tidak langsung berupa pinjaman atau kredit. Penyaluran dana dilakukan dengan tujuan untuk modal kerja, investasi dan deposito untuk jangka panjang dan menengah. Kegiatan usaha dari bank meliputi tiga kegiatan utama, yaitu⁹:

⁹Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: 2012, hal. 14

Gambar 1 Tiga Kegiatan Utama Bank



Sumber: Bank Rakyat Indonesia, data diolah

2. Tinjauan Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Ps. 1313 KUH Perdata memberikan pengertian tentang “Perjanjian”:

“Perjanjian adalah suatu kesepakatan atas perbuatan dengan satu orang atau lebih mengenai hal tertentu sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Suatu perjanjian mempunyai unsur yaitu pihak - pihak yang mempunyai kemampuan setara atau dapat dikatakan kompeten dari kedua belah pihak, komponen yang kedua, kesepakatan perjanjian harus berasal dari para pihak, Komponen ketiga, pertimbangan hukum sebab akibat munculnya perjanjian atau yang sering disebut hubungan timbal balik, serta hak dan kewajiban jelas yang harus dibagi secara jelas antara kedua belah pihak. Ciri perjanjian yang utama ialah bahwa kontrak, kontrak merupakan tulisan yang didalamnya terdapat isi-isi

yang memuat janji dari para pihak pembuat perjanjian secara lengkap dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan serta fungsi kontrak itu sendiri sebagai alat bukti tentang adanya perjanjian tertulis dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pihak mempunyai beberapa kehendak antara lain¹⁰:

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- b. Kebutuhan terhadap kesepakatan dari perjanjian yang telah di sepakati
- c. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum sebagai perlindungan dari kesepakatan yang terjadi.

Selain Undang- Undang yang dapat menimbulkan sebuah ikatan, Perjanjian atau kontrak juga merupakan salah satu yang dapat menimbulkan sebuah ikatan terhadap seseorang, lembaga atau instansi karenanya danya kesepakatan . Perikatan sendiri memiliki arti sebagai konektor atau hubungan hukum yang mengikat subjek hukum entah perorangan ataupun lembaga dengan kewajiban-kewajiban dan hak yang

b. Unsur – unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat 3 (tiga) macam unsur yang harus terpenuhi, yakni:

- 1) *Essentialia*, yaitu unsur yang harus ada dan sangat penting dalam suatu perjanjian, seperti kata sepakat antara kedua belah pihak.
- 2) *Naturalia*, yaitu unsur yang sewajarnya ada, jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.

¹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni 1993, hal. 1.

- 3) *Accidentalialia*, yaitu unsur yang ada apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

c. Asas – Asas Perjanjian

Fungsi asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai atau tolak ukur tersembunyi didalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Adapun beberapa asas didalam suatu perjanjian diantaranya:

a) Asas Konsensualitas (Consensualisme)

Dengan dasar Ps. 1320 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian ialah kata sepakat. Dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka secara otomatis perjanjian tersebut sudah sah dan secara otomatis kedua belah pihak terikat dalam sebuah kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.

b) Asas Kebebasan Berkontrak (Contracts-Vrijheid)

Asas Kebebasan berkontak merupakan asas dimana para pembuat perjanjian atau para pihak dapat bebas memilih atau mengikatkan diri dari sebuah kesepakatan terhadap siapapun dengan syarat tidak melanggar undang-undang. Selain itu pihak-pihak dalam perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian dengan syarat kedua belah pihak setuju dan tidak melawan undang-undang. Dan yang terpenting setiap kesepakatan yang tertulis dalam kontrak bersifat memaksa.

c) Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Kracht Der Overen Komst*)

Asas ini menjelaskan bahwa Para pihak harus menjalankan apa yang tertera dalam sebuah perjanjian yang kedua belah pihak

sepakati. Perjanjian yang disepakati secara sah dapat menimbulkan akibat hukum dan berlaku untuk semua pihak sebagai pembuat kesepakatan yang telah dijelaskan pada undang-undang (Ps. 1338 Ayat (1) KUH Perdata).

d) Asas Keseimbangan (Evenwichtsbeginssel)

Asas keseimbangan yakni para pihak dalam suatu perjanjian masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Yang mana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan sebaliknya Debitur memiliki kekuatan untuk menuntut *tegen/kontra* prestasi.

e) Asas Kepercayaan

Dalam suatu perjanjian kepercayaan menjadi landasan utama bagi para pihak yang membuat perjanjian. Tanpa adanya unsur kepercayaan satu sama lain dari masing-masing pihak, maka suatu perjanjian tidak akan tercipta.

d. Syarat Sah Perjanjian¹¹

Menurut Ps. 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu:

1) Adanya Kesepakatan Para Pihak

Dengan adanya kesepakatan maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang telah diadakan. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

¹¹ Komariah, 2013, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, hal. 146.

2) Kecakapan Bertindak

Dalam Ps. 1329 BW menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Sesuai dengan unsur perjanjian bahwa setiap pembuat perjanjian harus atau diajibkan kompeten atau dapat menerima dan memahami dari keduaabelah pihak agar munculnya sebuah perjanjian Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian orang orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang berwenang, selain itu harus memiliki akal sehat , umur yang cukup serta dapat memahami hak dan kewajiban akibat munculnya sebuah perjanjian yaitu seseorang yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah.

3) Suatu Hak Tertentu

Suatu Hak tertentu yaitu barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian yang dapat ditentukan jenisnya, namun jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian. Syarat untuk menjadi objek perjanjian adalah:

- a) Ps. 1332 KUHPer mengatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”.
- b) Ps. 1333 KUHPer mengatakan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

c) Ps. 1334 KUHPer mengatakan bahwa “Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.

4) Adanya Kausa yang Halal

Dalam Ps. 1320 KUH Perdata, tidak menjelaskan secara gamblang mengenai pengertian kausa yang halal (*oorzaak*), sedangkan didalam Ps. 1337 KUH Perdata hanya dikatakan kausa yang terlarang. Oleh karena itu maka pada Ps. 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa sebuah perjanjian dapat tidak memiliki kekuatan apabila perjanjian tersebut disebabkan oleh sebab yang palsu atau untuk tidak pemalsuan atau merugikan orang lain. Pada Ps. Ps. 1337 KUH juga di jelaskan bahwa perjanjian halal dapat dilihat dari subject dan objectnya dimana sebuah perjanjian akan tidak mempunyai kekuatan atau batal secara hukum apabila sebuah perjanjian tidak lazim seperti melawan ketertiban umum (object) atau perjanjian yang terkandung tindakan asusila seperti perjanjian Amdal hotel yang terdapat prostistusi (alexis jakarta) nam maka kesepakatan dalam perjanjian dapat dibatalkan tau tidak mempunyai kekuatan hukum.

e. Berakhirnya Perjanjian

Ps. 1319 KUHPerdata menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya “berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam undang-undang, tetapi hal

itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut”. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut disebabkan oleh:

- a) Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus;
- b) Undang-undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian;
- c) Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan;
- d) Salah satu pihak meninggal dunia;
- e) Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh salah; satu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan;
- f) Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan;
- g) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

3. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Bank

Istilah kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yang berbunyi *Credere*, yang berarti “Kepercayaan” atau *Credo*, artinya “Saya percaya”. Pemberian kredit harus didasari oleh kepercayaan. Pemberian kredit terhadap orang atau badan usaha yang membutuhkan dana di perlukan sebuah ikatan perjanjian dimana dalam perjanjian pihak pihak harus dapat memenuhi hak dan kewajiban kewajiban yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak tidak dapat memenuhi sebuah kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya. Maka dapat di ambil keputusan sesuai sebab

akibat dalam perjajian seperti pemindahan harta kekayaan atau materi dari pihak yang kekuarangan dana terhadap pihak yang memberikan dana sebagai pemenuhan kewajiban yang tidak terbayar atau kreditt.

Rolling G. Thomas dan Amir R. Batubara, mengemukakan bahwa pemberian kredit pada umumnya berdasarkan kemampuan seorang debitur atau pihak yang mengabil suah kredit hal ini berdasar bahwa apabila sebuah kredit sesuai kempuan maka kemungkinan terjadinya gagal bayar atau wanprestasi dari kedua belah pihak dapat dapat dikurangi atau berisiko kecil. Selain itu tingkat kepercayaan akan dapat dijaga jarena seorang debitur mengabil kredit sesuai dengan kemampuannya. Adapun pengertian kredit yang tercantum dalam Ps. 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

“bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meinjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari penjelasan di atas maka terdapat nsur- unsur yang terkandung dalam kredit , diantaranya sebagai berikut :

- a) Adanya pihak yang kelebihan dana , beupa materi yang dapat di salurkan menjadi kredit
- b) Adanya pihak yang kekurangan dana atau badan selaku pihak yang meminjam uang, barang atau jasa.
- c) Terdapat kredibilitas atau kepercayaan kemampuan dari debitur

- d) Adanya kontak yang menjelaskan sebab akibat adanya wanprestasi atau gagal bayar
- e) Adanya risiko.

Perjanjian kredit merupakan perikatan dari perjanjian dari kedua pihak antara peminjam (pihak kekeuarangan dana) dan Bank atau badan usaha (pihak kelebihan dana) dimana perjanjian kredit menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian. Perjanjian kredit Bank merupakan perjanjian pendahuluan (*woorowereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian uang ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Jadi perjanjian atau kontak bank dengan debitur merupakan kepercayaan bank terhadap debitur dalam memberikan kredit sesuai dengan kemampuan seorang dimana dalam pembayaran kewajiban atas timbulnya hutang atau kredit terhadap bank harus dipenuhi sesuai target atau aktu yang ditentukan oleh pihak bank dan debitur sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak tersebut.

a. Bentuk Perjanjian Kredit Bank

Bentuk perjanjian kredit dikaitkan dengan teori kepastian hal ini karena didasari oleh kemampuan seorang debitur dalam membayar hutang atau kreditnya harus memiliki jatuh tempo. Dalam perjanjian kredit hukum pemberian kredit dibagi menjadi dua : Pertama, perjanjian hukum secara lisan. Kedua, perjanjian akta atau tertulis. Dalam perjanjian sepatutnya dibuat dengan akta autentik. Hal tersebut bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap pemberi dana dan peminjam dana selain

itu jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari. Pada umumnya perjanjian di era modern menggunakan akta tertulis karena dirasa akta tertulis lebih aman daripada lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak dapat lebih jelas dan sulit mengingkari karena terdapat bukti otentik dari perjanjian yang di sepakati.

Salah satu fungsi perjanjian kredit yaitu dapat digunakan untuk alat bukti karena bentuknya yang berupa akta. Didalam praktek bank bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu:

1) Perjanjian Kredit dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak contohnya bank yang kemudian baru di tawarkan kepada debitur untuk disepakati , hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, faktor yang sering terjadi adalah untuk mempercepat kredit yang diajukan, mempercepat kinerja bank dalam emenuhi kredit yang diajukan, namun perjanjian nini cukup riskan mengingat tingkat kepercayaan bank terhadap debitur tinggi , disisi lain debitur tidak dapat memperhitungkan resiko atau kemampuan membayar tanggungan sehingga dapat memicu gagal bayar atau wanprestasi.

Bentuk perjanjian ini dibuat oleh notaris, Bentuk perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian di era modern dan cukup safety untuk kedua belah pihak , diman dalam perjanjian ini sebenrnya bank telah menyiapak semua persyaratan dan diajukan ke notars dan notaris mengeluarkan akta notariil. Yang nantinya akta ini di buat

perjajian dihadapan notaris atara bank dan nasabah. Serangkaian proses penyaringan membuat seorang kreditur dan debitur menghitung dan memperkirakan kemampuan masing masing dalam mebayar kredit ataupun memberi kredit, sehingga gagal *fraud* atau gagal bayar dapat dikurangi. Dan ini merupak perjajian yang ideal pada era *modern* saat ini.

b. Pihak – pihak dalam Perjanjian Kredit

Sesuai Ps. 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara dua pihak berupa perikatan dapat timbul dari adanya suatu perjanjian .

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Ps. 16 “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank” serta Ps. 18 “nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

c. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit

Dalam perjanjian kredit terdapat sebuah kesepakatan sejak adanya kesepakatan dari (bank dan debitur) maka dalam perjajian tersebut terdapat hak dimana debitur dapat memperoleh uang kredit dan memiliki kewajiban memenuhi bayar kredit (bunga) tiap jatuh tempo begitu juga sebaliknya bank berkewajiban meberi dana dan berhak mengambil materi atau jaminan apabila nasabah atau debitur agal bayar dalam hutang sesuai

perjajian tertulis yang disepakati. Sebagai pemberi kredit bank memiliki posisi lebih kuat daripada nasabah sebagai penerima kredit. Ps. 1759-1762 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan dalam perjanjian pinjam meminjam yang berlaku pula dalam perjanjian kredit. Pemberi pinjaman (kreditur) tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

4. Tinjauan Tentang Kredit KUR Mikro

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

Dalam Ps. 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah menjelaskan bahwa:

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian dalam Ps. 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa kriteria usaha mikro sebagai berikut :

Tabel 2 Pembagian Usaha Mikro

No	Usaha MIKRO	Kreteria
1	Usaha Mikro Kecil	Kekayaan Usaha > 50 / juta tahun (tidak termasuk tanah dan bangunan)
2	Usaha Mikro Midlle	Kekayaan Usaha < 300 Juta

Ps. 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:

”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan unit perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Kriteria usaha kecil dalam Ps. 6 ayat (2) Undang-Undang yaitu:

Tabel 3 Pembagian Usaha Kecil

No	Jenis Usaha Kecil	Kreteria
1	Usaha Kecil	Hasil Usaha 50Jt-500Jt Kekayaan 250Jt (Tanah & Bangunan)
2	Usaha Kecil Menengah	Hasil Usaha 500Jt- 2,5 M

Pengertian UMKM adalah:

“Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau unit perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Djoko Retnadi memberikan pengertiannya mengenai Kredit Modal Kerja yakni, “Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM–K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dan Perusahaan Penjamin”.¹²

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk UMKM atau Usaha kecil yang dimana UMKM belum dapat dikatakan *bankable* atau memenuhi standartrisasi pengajuan kredit bank seperti pencatatan yang masih belum ada jaminan yang terolong lemah dan sebagainya., namun UMKM merupakan sektor bisnis yang sangat prospektif di mata pemerintah karena dapat mengurangi pengangguran oleh karena itu UMKM dapat akses KUR murah adari perbnakan.

b. Landasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 . Pada intinya KUR diharapkan dapat mendorong sektor rill. Sektor rill sendiri merupakan sektor penghasil barang dan jasa dimana sektor

¹² Admin. Peluncuran KUR. <http://www.bni.co.id>. 20 Desember 2017

tersebut selain dapat mendorong prekonomian rakyat kecil juga dapat mengurangi permasalahan pengangguran yang berada di Indonesia.

Dengan adanya KUR , pemerintah berharap untuk jenis usaha mikro atau kecil yang berpotensi dapat mengembangkan usahanya sehingga menjadi tulang punggung perekonomian sektor kecil, selain itu memberi solusi untuk usaha yang kekurangan modal serta usaha yang belum *bankable* untuk dapat berkembang atau menjalankan usaha

Dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah ingin meningkatkan sektor investasi dengan efisiensi kredit dimana dengan kemudahan kredit dan bunga yang rendah maka usaha atau investasi dalam negeri dapat berjalan dimana apabila perekonomian berjalan maka pemerintah tidak perlulah menganggulangi permasalahan perekonomian seperti pengangguran. Hal ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu:

- 1) Kredit KUR Mikro:
 - a) Plafond kredit maksimal Rp 20 juta;
 - b) Suku bunga efektif maksimal 22% per tahun;
 - c) Jangka waktu dan jenis kredit:
 1. Kredit Modal Kerja (KMK): Maksimal 3 Tahun;
 2. Kredit Investasi (KI): Maksimal 5 Tahun;

- d) Agunan dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai dengan keyakinan Bank debitur dapat memenuhi seluruh kewajiban kepada bank. Sedangkan agunan Tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank Pelaksana;
 - e) Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak;
 - f) Memiliki legalitas yang lengkap seperti KTP/ SIM, KK;
 - g) Lama usaha minimal 6 bulan;
- 2) Kredit KUR Ritel
- a) Plafond kredit > Rp 20 juta s/d Rp 500 juta;
 - b) Suku bunga efektif maksimal 13% per tahun;
 - c) Jangka waktu dan jenis kredit:
 - 1. Kredit Modal Kerja (KMK): Maksimal 3 Tahun;
 - 2. Kredit Investasi (KI): Maksimal 5 Tahun;
 - d) Agunan dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai dengan keyakinan Bank debitur dapat memenuhi seluruh kewajiban kepada bank. Sedangkan agunan Tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank Pelaksana;
 - e) Calon debitur adalah individu (perorangan/badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak;
 - f) Memiliki legalitas yang lengkap:
 - 1. Individu: KTP/SIM & KK;
 - 2. Kelompok: Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Kepala Desa/Kelurahan atau Akta Notaris;

3. Koperasi/Badan Usaha Lain: Sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g) Lama usaha minimal 6 bulan;
 - h) Perijinan: SIUP, TDP, Surat Keterangan Usaha dari Lurah/
Kepala Desa, atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Kredit KUR *Linkage* Program (*Executing*)
- a) Plafond kredit:
 1. Plafond maksimal Rp 2 Miliar;
 2. Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke *end user* maksimal Rp 100 juta;
 - b) Suku bunga:
 1. Lembaga *Linkage*: Efektif maksimal 13% per tahun;
 2. Dari Lembaga *Linkage* ke UMKM: Efektif maksimal 22%;
 - c) Jangka waktu dan jenis kredit:
 1. Kredit Modal Kerja (KMK): Maksimal 3 Tahun;
 2. Kredit Investasi (KI): Maksimal 5 Tahun;
 - d) Agunan dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai dengan keyakinan Bank debitur dapat memenuhi seluruh kewajiban kepada bank. Sedangkan agunan Tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank Pelaksana;
 - e) Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/USP, BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM yang tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah;
 - f) Memiliki legalitas yang lengkap: AD/ART, memiliki Ijin Usaha dari pihak yang berwenang, pengurus aktif;

g) Lama usaha minimal 6 bulan.

d. Kredit KUR Mikro

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit yang disediakan untuk pelaku usaha mikro dimana akses dan persyaratan yang diberikan sangat mudah. Ada banyak pihak yang mencoba mendefinisikan kredit mikro sebagai berikut diantaranya:

Menurut *Grameen Banking* kredit mikro sebagai keuangan yang lemah untuk usaha sektor kecil dimana perputaran atau pemberian kredit jaminan tidak lagi diperlukan kecuali bentuk jaminan adalah usahanya sendiri. (Wardoyo Hendro Prabowo. Model Pengelolaan dan Pengembangan Kredit Mikro Koperasi Warga Tiara Kusuma Jakarta).¹³

B. Tinjauan Tentang Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

1. Tinjauan Tentang Kredit Bermasalah

Untuk mengetahui suatu kredit termasuk dalam kredit bermasalah atau kredit macet, dapat dilihat dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah kemampuan yang dapat dilihat dari seorang debitur dalam membayar tanggungan atau bayar bunga pokok. Kredit sendiri terbagi menjadi 5 jenis kredit menurut Bank Indonesia :

- 1) Kredit lancar
yaitu pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik).
- 2) Kredit dalam perhatian khusus

¹³ <http://repository.gunadarma.ac.id>, diakses tanggal 2 Januari 2018

yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari. Jarang mengalami cerukan.

- 3) Kredit kurang lancar
yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 4) Kredit diragukan
Yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 5) Kredit macet
Yaitu terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

Apabila sampai terjadi kredit macet, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit macet sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan. Penyelamatan kredit bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan cara (*Reschedulling, Reconditioning, Restructuring*).

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit

bermasalah didalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semuanya kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

2. Tinjauan Tentang Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi berasal dari istilah aslinya “dalam bahasa Belanda “wamprestatic” yang artinya tidak dapat terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dan sebuah perjanjian tau kontak . dalam ketidak mampuan seseorang dalam menjalankan maupun memenuhi kewajiban terdapat 2 faktor , Pertama Kelalaian dan kedua kesengajaan :

- a) Ketikmampuan (*force majeure*) atau keadaan diluar ekspektsi jadi.

Dalam keadaan ini debitur tidak bersalah..

Dalam sebuah perjanjian atau kontak terdapat salah satu pihak lalai atau maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dengan demikian seseorang yang alali dalam sebuah perjanjian sengaja maupun tidak disengaja maka dapat dikatakan wanprestasi Hal-hal yang termasuk kategori lalai adalah :

- a) Jika lalai melunasi kewajiban
- b) Jika hanya sebagai kewajiban yang terbayar
- c) Jika kewajiban terbayar tetapi telat dalam membayar jatuh tempo

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak mempunyai akibat hukum bagi pihak lainnya, oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan sejak kapan seseorang itu dikatakan melakukan wanprestasi.

Dalam perjalan perjanjian apabila telah di tentukan batas akhir pembayaran maka pemenuhan prestasi harus segera dilakukan sebelum

batas waktu tersebut lewat. apabila dalam perjanjian tidak dicantumkan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka perlu dilakukan peringatan pada pihak yang bersangkutan agar memenuhi.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi ini, kadang-kadang menimbulkan keraguan untuk menentukan bentuk yang mana debitur yang melakukan wanprestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya, maka termasuk pada bentuk pertama, sedangkan apabila debitur masih memenuhi prestasinya, maka dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, maka ada dua kemungkinan yaitu apabila masih dapat diharapkan untuk diperbaiki, maka dianggap terlambat memenuhi prestasi, dan apabila tidak dapat diharapkan lagi maka dianggap debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali.

a. Tinjauan Tentang Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Cara Non Litigasi

1) Perundingan

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahapan penyelesaian kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih fleksibel. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi

kredit. Restrukturisasi merupakan penyelesaian kredit bermasalah secara internal pada sebuah bank.

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank pada intinya restrukturisasi ini adalah membangun kembali apa yang sudah rusak, agar seorang debitur yang wanprestasi dapat membayar hutnya dengan bimbingan bank. Dalam kasus ini merupakan debitur yang dapat di katagorikan kegagalan secara nonteknis atau ketidaksengajaan atau di luar kemampuan seperti serangan bencana alam atau tertipu.

1. *Rescheduling*

Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan bank dari gagal bayar dan mengamankan plafond kredit agar kembali . Cara ini merupakan cara bank untuk tidak rugi dalam pengembalian kredit terhadap seorang nasabah. Cara ini biasanya digunakan bank dalam mengatasi nasabah yang memiliki kempuan bayar namun termasuk nasabah yang kurang lancar.

Reconditioning ni digunakan ketika mengatasi nasabah yang telah FRAUD atau dikatakan telah nasabah break down atau tidak memiliki kempuan membayar secara utuh sehingga memberikan keringantan dengan Menurunkan tingkat suku bunga kredit, Mempermudah persyaratan untuk pencairan kredit ,Meringankan

jaminan kredit (agunan) dan Meringankan besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitur kepada bank;

3. *Restructuring*

Restructuring adalah cara terakhir yang dilakukan oleh bank ketika seorang nasabah gagal bayar dan tidak mempunyai apapundalam hal ini bank mengamankan plafond dengan membangun kembali nasabah dengan di tata kembali jadwal pembayaran dengan hanya di tarik pafond kredit dengan bunga yang sangat rendah.

2) **Ahli Debitur**

Ahli debitur Merupakan cara pengalihan hutang dari pihak laian terhadap pihak lain hal ini dilakukan untuk debitur yang mengalami kesulitan bayar bunga, dalam konteks ini dapat di contohkan kredit rumah atau kendaraan bergerak, dimana kredit di lanjutkan oleh pihak kedua

3) **Pengurangan Tunggakan Bunga Dan/Atau Denda.**

Biasanya diberikan kepada debitur yang memiliki itikat baik, mempunyai kemampuan mebayar namun tidak dapat melunasi dalam jatuh tempo maka bank kan mengurangi tanggggungan dengan beberapa syarat yaitu Nilai/besarnya keringanan tunggakan bunga/dan atau denda yang dapat diberikan kepada debitur yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana kriteria diatas mengacu pada pilar kemauan (P1) dan Kemauan (P2), Apabila berdasarkan hasil analisa kemampuan debitur dan potensi nilai *recovery* yang diterima bank, debitur dapat diberikan diskon tunggakan bunga dan/atau denda melebihi perhitungan diatas,

maka dapat diberikan diskon maksimal sebesar kewenangan memutus pejabat pemutus sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi sendiri

4) Pengambilan Asset Debitur (*Set off*)

Set off adalah pengalihan hutang terhadap asset pemilik hutang dalam hal ini debitur memiliki kempuan membayar dengan asset tidak dengan bunga, maka jalan set off ini adalah jalan konfersi benda seperti rumah di ubah menjadi nominal hutang.

5) Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit adalah pemberlakuan suku bunga kredit dibawah suku bunga yang berlaku, Biasanya diberikan kepada debitur yang kooperatif dan nyata-nyata mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajibanya pada bank, namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

Kebijakan :

Kebijakan pemberian suku bunga kredit merupakan kewenangan Direksi yang diajukan oleh Kantor Unit secara khusus per Kantor Pusat dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dan analisa Cost and benfit bagi bank.

6) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit.

Kebijakan ini di ambil ketika seorang debitur mempunyai iktikad baik dan mempunyai kempuan bayar yag masih bisa di usahakan meskipun dengan tenggang waktu lama, kenijkan ini untuk mengurangi waktu yang lama dalam membayar maka bank memilih jalur pegurangan tunggakan pkok kredit

Kebijakan ini dilihat dari :

- 1) Pengurangan tunggakan pokok kredit yang hanya diberikan apabila debitur melunasi seluruh tunggakan pokok kredit yang tersisa dan meneruskan membayar angsuran secara rutin atas sisa kredit.
- 2) Pengurangan tunggakan pokok kredit hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan pemilik (pemegang saham).

b. Tinjauan tentang Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Litigasi

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau gagal bayar dengan jumlah yang besar dan nasabih tidak memiliki iktikad baik maka, Penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan (jalur Litigasi) dapat dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) cara:

- 1) Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri
- 2) Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Utang Melalui Pengadilan Negeri
- 3) Mengajukan Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Negeri Atas Dasar Wanprestasi
- 4) Pelelangan Agunan Debitur Melalui Lelang Eksekusi
- 5) Mengajukan Permohonan Pailit Atas Debitur Melalui Pengadilan Niaga

Dalam hal ini bank sangat memperhatikan effesiensi dan efektifitas dimana , legitimasi sengat memerlukan waktu dan biaya , oleh karena itu bank sangat mempersiapkan dan dikhususkan untu nasabih yang mempunyai asset atau kekayaan namun tidak mau membayar secara disengaja.